



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 166/Kep.DPRD-01/2017

TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN
TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN
MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, maka perlu untuk menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2017;
- b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Tahun Sidang 2017 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Surat Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

- KEDUA : Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2017 sebagaimana Diktum KESATU merupakan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersifat tetap.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2017.

NOMOR : 166/Kep.DPRD-01/2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD PROVINSI JAWA BARAT

ALAT KELENGKAPAN DPRD	BIDANG	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3		5	6
KOMISI I	Bidang Pemerintahan : 1. Pemerintahan; 2. Ketentraman dan Ketertiban; 3. Kependudukan; 4. Penerangan dan Pers; 5. Hukum Perundang undangan dan Hak Asasi Manusia; 6. Kepegawaian; 7. Aparatur dan Penanganan KKN; 8. Perijinan; 9. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; 10. Pertanahan; 11. Kekayaan Daerah; 12. Telematika; 13. Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan; 14. Polisi Pamong Praja; 15. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, serta; 16. Perlindungan Konsumen.	1. H. Syahrir, SE 2. Ir. Sri Budiharjo Hermawan 3. H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag 4. Hj. Ganiwati, SH.,MM 5. H. Hidayat Royani, SH.,MH 6. H. Babay Tamimi 7. Iis Turniasih 8. Bambang Mujiharto 9. H. Tate Qomaruddin, Lc 10. Sadar Muslihat, SH 11. DR.H. Didin Supriadin, S.Pd.,M.Si 12. Ade Anwas 13. Drs. H. Yusuf Puadz 14. H. M. Iqbal, MI 15. Hj. Imas Noeraini, S.Pdi 16. H. Saepudin Zuhri, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Golongan Karya Amanah Fraksi Golongan Karya Amanah Fraksi Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	

1	2	3	4	5	6
KOMISI II	Bidang Perekonomian : 1. Perdagangan dan Perindustrian; 2. Wilayah Kelautan Daerah; 3. Konservasi Alam; 4. Ketahanan Pangan; 5. Pertanian Tanaman Pangan; 6. Peternakan; 7. Perikanan; 8. Perkebunan; 9. Kehutanan; 10. Logistik; 11. Koperasi dan Pengusaha Kecil, serta; 12. Pariwisata.	1. Ir. H. Ridho Budiman Utama 2. Dra. Hj. Ijah Hartini 3. Asep Wahyu Wijaya, SH 4. Drs. H.A. Rozaq Muslim, SH.,M.Si 5. H. Kusnadi, S.Ip 6. H. Tien Sutini Bunyamin, S.Sos,M.Ap 7. Ir. H. Herry Dermawan 8. R.Yunandar R. Eka Perwira, ST 9. Agus Welianto Santosa, SH 10. H. Drajat Hidayat Soetarja 11. H. Satori, S.Pd,I, MM 12. H. Abdul Muiz, Lc 13. Toni Setiawan 14. Dra. Hj. Lina Ruslinawati 15. Dadang Kurniawan, S.Ip 16. H. Pecep Saeful Hidayat, S.Ikom 17. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd,M.Ap 18. Dra Tia Fitriani 19. Erni Sugianti, S.Ag	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	

1	2	3	4	5	6
KOMISI III	<p>Bidang Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,Retribusi, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yg dipisahkan, lain-lain PAD yang sah); 2. Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, DAU, DAK, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak & Gas Alam; 3. Pajak Air; 4. Pinjaman Daerah; 5. Perbankan; 6. Dunia Usaha; 7. Otorita; 8. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD; 9. Penanaman Modal Asing; 10. Penanaman Modal Dalam Negeri; 11. Dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec 2. Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si 3. H. Didi Sukardi, SE 4. Hj. Dede T. Widarsih, SE 5. H.E. Kusnadi, SH 6. Hj. Sumiyati, S.Pdi 7. Chaerul Rizky P. Mantini 8. Iwan Kustiawan 9. H. Surahman, S.Sos 10. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA 11. DR. Herlas Juniar, MT 12. DR. Sunatra, SH.,MS 13. Hj. Gina Fadlia Swara, SE. 14. H. Teuku Hanibal, SE 15. H. Omin Basuni, SH 16. H. Eryani Sulam, M.Si 17. DR.Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH,MH 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

1	2	3	4	5	6
KOMISI IV	<p>Bidang Pembangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman); 2. Perencanaan dan Pengendalian; 3. Pembangunan Regional; 4. Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional; 5. Perhubungan dan Telekomunikasi; 6. Pertambangan dan Energi; 7. Perumahan Rakyat; 8. Penelitian dan Pengembangan Daerah; 9. Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DR.Hj.Siti Aisyah Tuti H. S.Sos.,M.Si 2. Drs. H. Daddy Rohanady 3. Nia Purnakania, SH.,M.Kn 4. H. Phinnera Wijaya, SE 5. H. Almaida Rosa Putra, SE.,MM 6. Drs. H. Yod Mintaraga, MPA 7. H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,H.Hum 8. H. Ali Hasan, S.IP 9. Waras Wasisto, SH 10. Drs. Budiyo 11. Ir.H. Gatot Tjahyono, MM 12. Drs. Nur Supriyanto, MM 13. drg. Hj. Is Budi Widuri S, MM 14. Wiwin Winingsih, SE 15. H. Wawan Setiawan, SH 16. H. Ricky Kurniawan, Lc. 17. Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana 18. H. Rustandi, SH 19. H. Marjaya Ibrahim, S.Ip 20. Ahmad Irfan Alawi 21. H. Oleh Soleh, SH 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Gerindra Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

1	2	3	4	5	6
KOMISI V	Bidang Kesejahteraan Rakyat : 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Industri Strategis; 3. Ketenagakerjaan termasuk Perlindungan TKI; 4. Pendidikan; 5. Kebudayaan; 6. Pemuda dan Olah Raga; 7. Agama; 8. Sosial; 9. Kesehatan; 10. Keluarga Berencana; 11. Pemberdayaan Perempuan; 12. Transmigrasi, serta; 13. Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.	1. H. Syamsul Bachri, SH.,MBA 2. H. Yomanus Untung, S.Pd 3. Drs. H. Tetep Abdulatif 4. Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM 5. Drs. Maman Abdurrachman 6. Dedi Hasan Bahtiar, SE 7. Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE 8. dr.H. Ikhwan Fauzi, M.Kes 9. Ir. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc 10. H. Sahromi 11. Hj. Yoyoh Rukiyah, S.Ter.Keb 12. Toto Purwanto Sandi, SE 13. H.Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si 14. Mirza Agam Gumay, Sm.Hk 15. KH. Chumaedi, SH 16. Drs. KH. Habib Syarief Muhamad 17. H. Imran Servia 18. H. Ali Wardana, SE 19. Nasir, S.Ag 20. Hj. Fatimah, SH,M.Kn	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2017.

NOMOR : 166/Kep.DPRD-01/2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

ALAT KELENGKAPAN DPRD	TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3	4	5	6
Badan Pembentukan Perda Provinsi	<p>Tugas :</p> <p>a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;</p> <p>b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;</p> <p>c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;</p> <p>d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. KH. Habib Syarief Muhamad 2. R. Yunandar R. Eka Perwira, ST 3. Drs.H.Daud Achmad 4. H. Yomanius Untung, S.Pd 5. Hj. Ganiwati, SH.,MM 6. Hj. Dede T. Widarsih, SE 7. Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM 8. H.M.Hasbullah Rahmad,S.Pd.,M.Hum 9. Iwan Kustiawan 10. Chaerul Rizky Mantini 11. Drs. Budiyo 12. Sadar Muslihat, SH 13. H. Abdul Muiz, Lc. 14. Ir. Sri Budiharjo Hermawan 15. Toni Setiawan 16. Wiwin Winingsih, SE 17. Dra. Hj. Lina Ruslinawati 18. Hj. Gina Fadlia Swara, SE.,MM 19. KH. Chumaedi, SH 20. H. Rustandie, SH 21. H. Ali Wardana, SE 22. Hj. Fatimah, SH.,M.Kn 23. Erni Sugiyanti.S.Ag 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris (Bukan Anggota)</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>-</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p> <p>Fraksi Nasdem Hanura</p> <p>Fraksi Nasdem Hanura</p> <p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p> <p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

	<p>e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;</p> <p>f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;</p> <p>g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan</p> <p>h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.</p>				
--	--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2017.****NOMOR : 166/Kep.DPRD-01/2017****TANGGAL : 4 Januari 2017****SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

ALAT KELENGKAPAN DPRD	TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3	4	5	6
Badan Kehormatan	Tugas : a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata tertib dan/atau Kode etik DPRD; c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.	1. H. Saipudin Zukhri, SH 2. Dadang Kurniawan, S.Ip 3. H. Babay Tamimi 4. Drs. Budiyo 5. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA 6. H. Sahromi 7. KH. Chumaedi, SH	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

